Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	8

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

Bantuan Pendidikan Rp821 Miliar Masih Kurang

Jumlah Siswa Miskin Diprediksi Melonjak

SEMARANG - Pemprov Jateng mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK negeri dan swasta Rp 821 miliar pada tahun ini. Sebanyak Rp 721 miliar untuk SMA/SMK negeri dan Rp 100 miliar untuk SMA/SMK swasta.

Namun, jika dikalkulasi, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan operasional sekolah. Salah satu alasannya, jumlah siswa miskin tahun ini diperkirakan naik dibanding tahun lalu, dari 11,86% menjadi sekitar 31%.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan, Pemprov perlu menambah alokasi anggaran untuk SMA/SMK pada anggaran perubahan 2018 ataupun APBD 2019.

Sebab, sesuai ketentuan, siswa miskin yang saat mendaftar menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun surat keterangan tidak mampu (SKTM) harus dibebaskan dari semua pungutan biaya.

"Anggaran itu jelas masih kurang. Apalagi jumlah siswa miskin pada PPDB (penerimaan peserta didik baru) kali ini bertambah. Maka harus dialokasikan pada anggaran perubahan dan APBD 2019," kata Zen, kemarin.

Biaya Peran Serta

Pada kegiatan belajar mengajar 2017/2018, lanjut Zen, siswa SMA/SMK dipungut biaya ''peran serta masyarakat" Rp 75 ribu-Rp 90 ribu per siswa. Jumlah itu memang lebih rendah dari tahun ajaran sebelumnya yang berkisar Rp 150 ribu per siswa.

Biaya ini berdasarkan keputusan komite sekolah atas siswa dari keluarga mampu.

Sementara, kebutuhan utama siswa sudah dicukupi dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka sekolah harus membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) ulang.

"Sekolah harus mengevaluasi dan merumuskan kembali RAPBS. Masih perlu biaya lagi atau tidak? Kalau ya, berapa yang dibebankan pada siswa melalui peran serta masyarakat," ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, BOP untuk SMA/SMK tersebut akan dikelola sendiri oleh sekolah, sehingga bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas pendidikan ataupun tunjangan kesejahteraan guru.

Pemberian tunjangan untuk guru swasta, lanjutnya, bukan kewajiban Pemprov. Sebab, kewenangan Pemprov hanya mencakup SMA/SMK negeri dan SLB negeri.

Meski demikian, Pemprov bisa memberikan bantuan berupa pelatihan, mengirim tenaga pengajar, membantu peralatan, dan membantu fasilitas ruang kelas. (H81-19)